

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Penelitian

Pada akhir masa kekuasaan Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno terjadi banyak ketegangan politik yang mengakibatkan Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang dinamakan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), yang pada akhirnya memberikan kekuasaan kepada Soeharto. Supersemar yang dikeluarkan pada tahun 1966 ini menjadi titik awal lahirnya Orde Baru. Langkah awal yang dilakukan Soeharto setelah mendapatkan mandatnya dalam Supersemar segera membubarkan PKI dan membersihkan unsur-unsur PKI di dalam kabinet, DPRGR, birokrasi, dan ABRI itu sendiri. Supersemar itulah yang menyebabkan kekuasaan Soekarno dengan sistem politik Demokrasi Terpimpin menjadi lenyap. Lenyapnya kekuasaan Soekarno kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS yang melalui sidang istimewa pada tahun 1967 mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden, sehingga sebagai simbol pun Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian pada bulan Maret 1968 MPRS mengangkat dan melantik Letjen Soeharto sebagai Presiden (Poesponegoro, 2010).

Sejak mengambil alih kekuasaan, pemerintah Orde Baru secara tegas berkomitmen untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bersifat anti komunis dan berorientasi kuat pada Pembangunan, serta berupaya untuk membangun sistem pemilihan umum

yang mampu memelihara stabilitas pemerintahan. Salah satu tugas pertama yang harus dilaksanakan Presiden Soeharto adalah menyelenggarakan pemilihan umum, sebagaimana ditetapkan MPRS dalam Ketetapan No. XI/MPRS/1966.

Setelah menjabat sebagai Presiden, Soeharto tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk melegitimasi pemerintahan transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966, pemilu selambat-lambatnya harus diselenggarakan pada 1968. Akan tetapi, karena pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Sama dengan Pemilu 1955, Pemilu 1971 bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, melainkan adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten. Tugas memilih presiden dan wakil presiden berada di bawah kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Terdapat sekurang-kurangnya empat fungsi sekaligus tujuan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Konsiderans UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu menyebut keempat tujuan itu adalah: (1) memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan; (2) melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (3) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (4) sebagai sarana untuk “mencapai kemenangan Orde

Baru” dalam mewujudkan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD 1945 (Haris, 1998).

Peserta pemilu ditetapkan oleh presiden melalui Surat Keputusan Presiden No. 23 Tanggal 23 Mei 1970. Berdasarkan Surat Keputusan itu, parpol yang boleh ikut serta dalam pemilu berjumlah Sembilan, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Murba, dan IPKI, ditambah dengan Golkar. Perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Golkar memperoleh 236 kursi (62,82%), NU memperoleh 58 kursi (18,68%), Parmusi memperoleh 24 kursi (5,36%), PNI memperoleh 20 kursi (6,93%), PSII memperoleh 10 kursi (2,39%) dan Parkindo memperoleh 10 kursi (2,39%) (Kusumaningrum, 2019).

Angka ini jauh melampaui target Golongan Karya yaitu hanya 30 hingga 35 persen suara (Reeve, 2013). Golongan Karya sebagai pendatang baru dalam dunia politik berhasil menang mutlak dalam pemilu ini dengan meraih 236 kursi dari 360 kursi yang diperebutkan. Raihan suara Golkar itu di luar prediksi para peserta Pemilu, terlebih mengingat usia Golkar yang jauh lebih muda dibandingkan dengan umur parpol peserta pemilu lainnya.

Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum 1971 dan kenyataannya pemilihan umum ini tampak sejalan dengan keinginan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan aspirasi mereka dalam memilih. Namun, pemilihan umum 1971 juga dapat dikatakan memiliki batas-batas tertentu, antara lain bahwa

hanya 360 dari 460 anggota DPR yang dipilih. Selain itu menurut Alfian (1992), pemerintah juga memiliki kekhawatiran terhadap sulitnya mencapai konsensus dan dengan demikian terulang kembali sejarah Demokrasi Liberal.

Sekalipun tujuan dan fungsi pemilu sangat jelas, dalam realitasnya pemilu-pemilu Orde Baru diselenggarakan dalam rangka mendukung obsesi ganda pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, serta untuk menjaga format politik Orde Baru itu sendiri. Haris (1998) menerangkan bahwa, distorsi fungsi pemilu sebenarnya sudah bermula di sini, yaitu ketika stabilitas politik direduksi sekedar sebagai penegakan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*). Orde Baru Ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk mendirikan sebuah kondominium birokratis-militer di dalam negara (Ricklefs, 2008).

Partai-partai politik berusaha untuk memegang pemilihan atau bertahan dalam posisi yang ada, sedangkan Golongan Karya yang didukung oleh ABRI dan kelompok intelektual berusaha mendapatkan kepercayaan dalam upaya pembangunan Indonesia sebagaimana dicanangkan oleh Orde Baru sejak tahun 1966. Sekitar tahun 1967, pemerintah Soeharto telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum guna melegitimasi rezim. Kemenangan Golongan Karya banyak dipengaruhi oleh isu kampanye, karena pada saat itu masyarakat sedang dilanda kelesuan dan ketidaksenangan dengan tingkah laku partai politik dimasa lalu. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

bagi usaha kemenangan Golongan Karya. Salah satu kebijaksanaan tersebut adalah di keluarkannya peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1969 tentang perlu adanya monoloyalitas pegawai negeri pada pemerintah yang mengharuskan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Mereka tidak diizinkan memilih dan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golongan Karya (Ricklefs, 2008).

Sebelum Pemilu 1971 dilaksanakan, faksi militer dari elit penguasa memperkuat Golkar, yang sebelumnya berupa Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dan dibentuk pada 1964 dengan memanfaatkan kendali organisasi militer. Tidaklah mengejutkan bahwa Soeharto berpikir untuk menggunakan salah satu organisasi sebagai mesin pemilu untuk mempertahankan kepentingan militer. Soeharto berkeinginan untuk menggunakan sebuah kelompok independen yang diketuai oleh para intelektual anti-Soekarno dan anti-PKI untuk dikembangkan menjadi sebuah partai, tetapi kemudian ia meninggalkan gagasannya ini dan menjatuhkan pilihannya pada Sekber Golkar. Soeharto telah memilih untuk memenangkan pemilihan umum dan merekonstruksi perpolitikan menggunakan Sekber Golkar (Suryadinata, 1992).

Kemudian di dalam buku Sejarah Indonesia Modern karya M.C Ricklefs (2008), menjelaskan bahwa Ali Murtopo, Amir Mahmud, dan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) ditugaskan memastikan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum. Para

perwira militer dan pejabat yang turun ke desa diwajibkan menarik suara dalam jumlah yang sudah ditentukan. Para pemilih yang melihat pemilihan umum ini sebagai persaingan antara kekuatan Islam dan pemerintah yang “sekuler” dan para pemilih yang tidak beragama Islam mendukung Golkar.

Liddle (1992), menerangkan bahwa para mantan anggota PKI dipanggil ke markas Koramil dan diharuskan memilih Golkar, dan dengan demikian memotong peluang yang dapat menguntungkan PNI. Dua minggu sebelum pemungutan suara, rumah-rumah para pemimpin PNI dan NU di Kulon Progo digeledah dengan tuduhan penyimpanan senjata. Hal ini membuat para pemilih PNI menjadi lebih hati-hati. Tindakan ini mengakibatkan tumbuhnya rasa takut kepada militer. Dengan itu, secara ironis Golkar meraih banyak suara dari bekas basis PKI dan PNI (Suryadinata, 1992).

Kebanyakan kalangan menaruh harapan kepada Golkar untuk menjadi kekuatan yang mewujudkan perbaikan sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan menurut Ali Moertopo sendiri dalam bukunya mengatakan bahwa kemenangan Golongan Karya ini tercapai berkat kelonggaran keuangan, tunjangan para pejabat khususnya ABRI, pembentukan KORPRI (Korps Pegawai Negeri) dalam lingkungan departemen-departemen, institusi-institusi dan perudahaan-perusahaan, dan juga karena berbagai bentuk intimidasi. Semua ini tentu telah mempengaruhi kemenangan Golongan Karya, tetapi dapat dipastikan bahwa pendorong utamanya adalah semua orang berharap banyak kepada Golkar karena Golkar tidak pernah

mengalami stigma historis sebagaimana partai-partai politik lainnya (Moertopo, 1974).

Praktik-praktik mobilisasi dan intimidasi politik gencar dilakukan dengan memanfaatkan birokrasi politik dan militer dari pusat hingga ke tingkat daerah. mobilisasi dan intimidasi ini di kemudian hari menjadi bumerang bagi Orde Baru, sebab menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etis (Fatah, 2010). Dominasi militer dalam kehidupan politik Indonesia setelah kudeta juga mengubah hubungan antara militer dengan sipil pada umumnya serta antara militer dengan cendekiawan dan mahasiswa pada khususnya. Hubungan ini juga akan mempengaruhi sistem politik di Indonesia dan sekaligus hasil pemilu 1971.

Pemilu 1971 menjadi awal kejayaan Golkar sebagai mesin politik utama Orde Baru yang selalu melanggengkan Soeharto di kursi kepresidenan, terlebih setelah dilakukan fusi menjadi hanya tiga peserta saja dalam pemilu-pemilu berikutnya. Kebijakan penyederhanaan dengan fusi partai politik dilakukan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hasil sidang MPR Tahun 1973. Dalam ketetapan tersebut menjelaskan bahwa pemilu 1977 hanya diikuti oleh tiga peserta yaitu dua Partai Politik dan satu Golongan Karya (Safaat, 2017).

Pemerintah tidak melihat kemenangan pemilihan umum ini sebagai tanda bahwa kekuatan politik Indonesia sudah bisa dikendalikan.

Sebaliknya. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk menyingkirkan partai-partai lama. Pemerintah mendesak mereka untuk meleburkan diri ke dalam dua partai. Pada bulan Januari 1973 partai-partai yang tadinya masuk dalam golongan nasionalis bergabung pada satu wadah partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan kelompok spiritual menggabungkan kegiatan politiknya dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan untuk fusi ini tentunya menimbulkan berbagai masalah. Baik PDI maupun PPP mengalami kesulitan untuk menentukan identitas partai baru karena masing-masing dari mereka yang berfusi memiliki identitas tersendiri. Selain itu, kesulitan juga muncul dalam penyusunan kepengurusan dan berbagai konflik internal lainnya (Safaat, 2017).

Partai-partai PPP dan PDI tidak diizinkan memiliki cabang di bawah tingkat kabupaten, sebuah pembatasan yang tidak diterapkan pada Golkar. Golkar sudah memiliki jaringan kuat dalam birokrasi dan bagaimanapun, ia disamakan seolah-olah bukan partai politik. Akibatnya, mulai saat ini hingga selanjutnya, partai-partai politik bukan lagi merupakan tantangan serius bagi pemerintah (Ricklefs, 2008). Golkar pada akhirnya selalu mendominasi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi semu sepanjang era Orde Baru.

Menurut Selo Soemardjan (2000), Golongan Karya telah berhasil menguasai mayoritas suara di DPR dan dengan komposisi perimbangan kekuatan seperti itu, apapun yang dikehendaki Golongan Karya di lembaga

legislatif DPR dapat dijalankan dengan mudah, baik dalam membuat Undang-Undang maupun dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif. Salah satu strategi politik mayoritas tunggal yang dikejar Golongan Karya sendiri dengan perspektif politiknya dengan berbagai cara telah berhasil didapat .

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai Pemilu 1971 yang sebenarnya merupakan kesempatan baik untuk mewujudkan kehidupan negara demokratis setelah Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 1955, terlebih setelah pergolakan politik di tahun 1965 yang menyebabkan runtuhnya rezim Orde Lama. Sebagai pembanding, peneliti juga membandingkan penelitian sejenis seperti penelitian karya Noviah Iffatun Nisa' mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Jember tahun 2017 dengan judul "*Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1971-1997*" yang mengkaji faktor-faktor serta strategi Golongan Karya dalam kemenangan Pemilihan Umum pada masa Orde Baru. Selain itu peneliti juga membandingkan penelitian karya Nia Endra Puspita mahasiswi Sejarah Universitas Negeri Semarang tahun 2012 dengan judul "*Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di Semarang pada Pemilu 1971*" yang mengkaji perkembangan Golkar di Semarang pada tahun 1964-1971 serta mengetahui strategi politik Golkar dalam menghadapi Pemilu di Semarang. Sementara itu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini kepada latar belakang pelaksanaan Pemilihan

Umum 1971 dan dominasi Golongan Karya pada Pemilihan Umum 1971 serta permasalahan *Pseudo Democracy* yang menyertainya.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

a. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dikemukakan dan agar pembahasan lebih terarah, maka penelitian ini perlu diberikan pembatasan secara temporal (waktu). Adapun batas temporal yang ditetapkan adalah mulai tahun 1966 yang merupakan tahun dimana Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto melalui Surat Keputusan Sebelas Maret (Supersemar) sekaligus menandakan awal lahirnya kepemimpinan Orde Baru dan diakhiri dengan tahun 1977 yaitu masa berakhirnya periode Pemilihan Umum 1971.

b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Pemilihan Umum 1971?
2. Bagaimana dominasi Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1971?
3. Bagaimana dampak kemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1971?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pelaksanaan Pemilihan Umum 1971.
2. Untuk mendeskripsikan dominasi Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1971.
3. Untuk mendeskripsikan dampak kemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1971.

b. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembelajaran yang berkaitan dengan Sejarah Politik maupun Sejarah Orde Baru dalam berbagai tingkatan pendidikan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar rujukan bagi perkembangan riset-riset dan penelitian mengenai sejarah politik masa Orde Baru serta sebagai sebuah deskripsi mengenai perjalanan politik Indonesia terutama pada masa Orde Baru.

D. Kerangka Analisis

Terdapat beberapa kerangka teori yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini berkaitan dengan kompleksitas pemerintahan Orde Baru, maka dari itu permasalahan ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk membantu menerangkan kejadian, serta mengkaji sebab-sebabnya, penulis menggunakan ilmu bantu yaitu Ilmu Politik. Menurut Budiardjo (2017) Ilmu politik memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sejarah. Bagi ilmu politik, sejarah merupakan alat yang penting, dikarenakan sejarah menyumbang bahan berupa fakta dan data dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut.

Kata demokrasi sesungguhnya berangkat dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan, dengan ini demokrasi dapat diartikan secara harfiah sebagai “pemerintahan oleh rakyat” (Sorensen, 2014). Menurut Gaffar (1999), dalam ilmu politik terdapat dua macam pemahaman terkait demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Di dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara yang biasanya terdapat dalam konstitusi masing-masing negara, misalnya UUD 1945. Sedangkan dalam pemahaman secara empirik atau yang disebut juga *procedural democracy* biasanya dikaji dengan mempersyaratkan sejumlah indikator atau kriteria untuk melihat apakah demokrasi tersebut benar-benar terwujud.

Sistem politik yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat dengan asumsi rakyat paling sedikit sama kuat, atau lebih kuat daripada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari rakyat maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut bersifat otoriter. Banyak khalayak yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru lebih menerapkan sistem pemerintahan otoriter. Namun, bila dilihat secara seksama pemerintahan Orde Baru dapat membungkus otoritarianisme ini dengan politik demokrasi yang sedemikian rupa. Maka demokrasi seperti ini dapat dikatakan sebagai demokrasi pinjaman (Budiman, 1996).

Sebagian besar negara demokratis menganggap pemilihan umum sebagai simbol dan indikator dari kualitas demokrasi. Proses pemilihan umum dilaksanakan dalam suasana transparan dengan memperhatikan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, yang mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. (Budiardjo, 2017). Pemilihan umum merupakan praktik demokrasi yang sangat ideal, tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu sesuai dan terdapat banyak kekeliruan. Hal ini dapat diistilahkan sebagai *pseudo democracy*. Dalam bahasa Indonesia *pseudo* berarti kepura-puraan, semu atau palsu. *Pseudo democracy* selanjutnya dapat diartikan sebagai demokrasi semu atau demokrasi palsu, yang mana merupakan situasi seolah-olah demokratis namun pada kenyataannya tidak. *Pseudo democracy* dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Beberapa negara mungkin menunjukkan ciri-ciri *pseudo democracy* yang

lebih halus dan tersembunyi, sementara yang lain mungkin lebih terang-terangan dalam manipulasi mereka terhadap proses demokrasi.

Kemenangan Golongan Karya pada Pemilihan Umum 1971 mengawali karir politik Golongan Karya yang pada akhirnya selalu memegang kemenangan di setiap pemilihan umum Orde Baru. Pada kenyataannya, sistem politik pada masa Orde Baru memiliki kontrol kekuasaan yang sangat terbatas atau hanya berada di tangan segelintir elit. Fenomena ini selaras dengan Teori Elit Kekuasaan yang dikemukakan oleh C. Wright Mills. Teori ini menyatakan fenomena munculnya golongan yang sama yang selalu memegang kendali kekuasaan. Meskipun masyarakat terdiri dari berbagai macam kelompok yang pluralis, namun kekuasaan datang dari elit penguasa dari golongan masyarakat tertentu. Elit merupakan sekelompok individu yang menduduki posisi komando pada puncak pranata-pranata utama yang ada di masyarakat. Mereka menduduki posisi komando pada institusi-institusi ekonomi, militer, dan politik (Haryanto, 2017). Para elit dapat membuat keputusan yang membawa akibat yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat dengan kedudukan yang mereka miliki tersebut.

E. Metode dan Bahan Sumber

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah. Kuntowijoyo (2003) menjelaskan bahwa metode penelitian sejarah merupakan pendekatan yang memeriksa suatu permasalahan dari sudut pandang sejarah, dengan fokus pada penggunaan bahan sumber, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Metode penelitian sejarah melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi..

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah pemilihan topik. Peneliti memilih tema mengenai dominasi Golongan Karya (Golkar) dalam Pemilihan Umum 1971 yang juga merupakan pemilihan umum pertama yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Alasan peneliti mengambil tema tersebut selain tertarik akan sejarah pada masa Orde Baru namun juga dirasa menarik untuk menguak alasan dibalik langgengnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Langkah kedua yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Langkah heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2003). Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian sejarah antara lain sumber primer, sumber sekunder, dan sumber

tersier. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi dari sumber primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber tersebut didapatkan dari koleksi pribadi dan penelusuran sumber di Perpustakaan Nasional Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan.

Langkah ketiga yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik merupakan tahapan memilih dan mengkaji sumber tersebut benar, asli, dan dapat dipercaya atau tidak (Sjamsuddin, 2007). Ada dua jenis kritik yang dapat dilakukan, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern melibatkan penelitian terhadap keaslian data, seperti mengevaluasi karakteristik arsip atau dokumen, seperti jenis kertas, kondisi fisik arsip, dan tahun pembuatan. Di sisi lain, kritik intern berkaitan dengan penelitian terhadap kebenaran isi informasi dengan tujuan untuk menetapkan keotentikan sumber yang diperiksa dalam menghasilkan fakta-fakta sejarah. (Gottschalk, 1988).

Langkah keempat dalam metodologi penelitian sejarah adalah tahap interpretasi. Pada tahap ini, peneliti mengartikan isi sumber-sumber untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dalam merekonstruksi sejarah yang sedang disusun. Proses ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu analisis dan sintesis. Setelah mengumpulkan sumber-sumber, peneliti menganalisisnya secara terperinci untuk menguraikan informasi yang relevan, yang kemudian disatukan secara komprehensif melalui sintesis guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fakta-fakta yang ditemukan.

Tahapan terakhir dalam proses penulisan sejarah, yang dikenal sebagai historiografi, melibatkan penyajian hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini diungkapkan dalam bentuk karya ilmiah, seperti skripsi, yang terstruktur dalam empat bab utama mencakup pendahuluan, isi, dan kesimpulan..

b. Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dan sekunder didapatkan oleh peneliti melalui penelusuran sumber di Perpustakaan Nasional Indonesia, toko-toko buku, dan koleksi pribadi. Beberapa sumber primer yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah Majalah Mingguan Tempo yang diterbitkan sejaman, buku karangan Jusuf Wanandi dengan judul “Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”, dan juga buku karangan Ali Moertopo dengan judul “Strategi Politik Nasional”. Sumber sekunder didapatkan melalui penelusuran sumber berupa buku-buku sejarah seperti, buku karangan Leo Suryadinata dengan judul “Golkar dan Militer”, buku karangan David Reeve dengan judul “Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar, Pemikiran, dan Dinamika”, dan buku karangan Syamsudin Haris dengan judul “Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru”, majalah, dan penulisan ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.